



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT
KABUPATEN KUNINGAN**

Sekretariat Jl. Re. Martadinata No.517 Telp/Fax. 0232 871882 – Kuningan

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

JULI 2026



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretariat Jl. Re. Martadinata No.517 Telp/Fax. 0232 871882 – Kuningan

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB

YANG KAMI HORMATI SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI KABUPATEN KUNINGAN;
YANG KAMI HORMATI SAUDARA WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN;
YANG KAMI HORMATI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, KETUA
PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN
YANG KAMI HORMATI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
YANG KAMI HORMATI SUB DENOM KABUPATEN KUNINGAN
YANG KAMI HORMATI PARA KEPALA DINAS , BADAN, KANTOR, CAMAT DAN
LURAH SE KABUPATEN KUNINGAN
UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

*SEGALA PUJI HANYALAH MILIK ALLAH SWT, SHOLAWAT SERTA SALAM
SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR
MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGA, SAHABAT DAN ORANG-ORANG
MUKMIN YANG SENANTIASA SETIA MEMEGANG DAN MENJALANKAN
AJARANNYA HINGGA AKHIR JAMAN. SEHINGGA ALHAMDULILLAH KITA DAPAT
MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.*

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI,

SEBELUM MEMBACAKAN PANDANGAN UMUM INI, IZINKAN KAMI FRAKSI
PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG
SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA SELURUH JAJARAN

YANG TELAH MENYUSUN DAN MENYELESAIKAN SALAH SATU TUGAS KONSTITUSIONAL SELAKU KEPALA DAERAH YAKNI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025. PEMBAHASAN DAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA KEPALA DAERAH MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING TERKAIT PENINGKATAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS, PRODUKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SELAMA PERIODE TAHUN 2025 YANG LALU.

KAMI MENGUTIP AYAT INDAH YANG SERING KITA LANTUNKAN DARI QUR'ANULKARIM, DAN SUDAH SEMESTINYA UNTUK KITA MEN-TADABURINYA

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكْمَلُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

INTERPRETASI DARI KALAMULLAH DIATAS BISA MENCAKUP KE BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN, TIDAK TERKECUALI DALAM HAL BIROKRASI YANG MENJADI TUGAS BAGI PEMANGKU DAN PELAKSANA KEBIJAKAN UNTUK BISA MENJALANKAN APA YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN SOSIAL TENTUNYA.

SAAT MULUT SUDAH DIKUNCI BERARTI KITA SUDAH DIDAULAT DAN DIBERI AMANAH OLEH RAKYAT DAN NEGARA SEHINGGA YANG DITUNGGU OLEH RAKYAT BUKAN HANYA MULUT YANG HANYA BERBICARA MELAINKAN **“TANGAN YANG BERBICARA”** ARTINYA SENTUHAN TANGAN-TANGAN PEMANGKU KEBIJAKAN UNTUK BISA MENGEMBAN AMANAH RAKYAT, MENJAGA, DAN MEMBANGUN KESEJAHTERAAN BAGI RAKYAT. KEMUDIAN KATA YANG DISURATKAN IALAH KAKI YANG BERARTI PIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN. KAKI YANG BERANI MELANGKAH UNTUK MENELUSURI SELUK BELUK DAERAH UNTUK MELIHAT KONDISI MASYARAKAT KITA, DAN MEMBUAT LANGKAH-

LANGKAH YANG INOVATIF DALAM MEMBANGUN DAERAH KITA TERCINTA KABUPATEN KUNINGAN. TENTUNYA SEMUA TUGAS DAN LANGKAH-LANGKAH SERTA KEBIJAKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUSNYA HARUS BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA RAKYAT.

SEBELUM MENGAWALI PANDANGAN UMUM, KAMI FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MENGUCAPKAN HARI BHAYANGKARA YANG KE 80. TERIMA KASIH KEPADA SELURUH ANGGOTA POLRI YANG TELAH MENGABDI DEMI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KENYAMANAN MASYARAKAT INDONESIA DAN TENTUNYA KABUPATEN KUNINGAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI,

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN ATAS DIRAIHNYA KEMBALI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. CAPAIAN TERSEBUT PATUT DISYUKURI SEBAGAI INDIKATOR BAHWA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TELAH MEMENUHI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. NAMUN FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MENINGATKAN BAHWA WTP BUKANLAH PENCAPAIAN AKHIR MELAINKAN INI PROSESNYA DIIBARATKAN SEPERTI **"WATER TREATMENT PLAN"** YANG BERARTI FUNGSINYA SEPERTI SALURAN PIPA YANG MENYEDOT AIR SUNGAI ATAU DANAU YANG DI BERSIHKAN DAN DISIRKULASI, MELALUI PROSES PADA AIR ITU LAYAK DAN DAPAT DI MINUM.

DUA INDIKATOR UTAMA YANG MEMBUAT TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KUNINGAN DINILAI **"LAYAK MINUM"** YAITU LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN SECARA WAJAR DAN SESUAI DENGAN DATA KEUANGAN YANG DINYATAKAN BERSIH DAN SELURUH ANGGARAN TELAH DI KELOLA SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU. MESKIPUN SISTEM PENGOLAHAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KUNINGAN DINILAI TELAH MENGHASILKAN

"AIR BERSIH" NAMUN, SISTEM TERSEBUT BELUM SEPENUHNYA SEMPURNA DAN TETAP MASIH MEMILIKI RESIDU. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MENGHARAPKAN DAN MENDORONG AGAR SELURUH PIHAK UNTUK TERUS MENGAWAL DAN MEMBERIKAN KRITIK KONSTRUKTIF AGAR KUALITAS **"AIR BERSIH"** ATAU TATA KELOLA KEUANGAN YANG TRANSPARAN INI DAPAT TERUS BERLANJUT DAN DI PERTAHANKAN UNTUK KEDEPANNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI,

SETELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025, FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MEMBERIKAN BEBERAPA PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA, FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MENILAI LEMAHNYA KEMAMPUAN FISKAL DAERAH MASIH MENJADI PERSOALAN MENDASAR. TARGET PENDAPATAN DAERAH TIDAK TERCAPAI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH HANYA TEREALISASI SEKITAR 79,30 %. FAKTA INI MENUNJUKKAN BAHWA KABUPATEN KUNINGAN MASIH SANGAT BERGANTUNG PADA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT. KONDISI DEMIKIAN TIDAK SEHARUSNYA TERUS DIANGGAP SEBAGAI KEADAAN YANG BIASA. KETERGANTUNGAN FISKAL AKAN MEMBUAT RUANG GERAK PEMBANGUNAN DAERAH SEMAKIN SEMPIT KETIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT BERUBAH. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MEMPERTANYAKAN, DI MANA LETAK INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGGALI POTENSI PENDAPATAN? MENGAPA POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BEGITU BESAR BELUM MAMPU DITERJEMAHKAN MENJADI PENINGKATAN PAD? JANGAN SAMPAI SETIAP TAHUN TARGET HANYA MENJADI ANGKA DI ATAS KERTAS TANPA STRATEGI YANG TERUKUR UNTUK MENCAPAINYA.

SEDANGKAN DARI LAIN-LAIN PAD YANG SAH ADA KOMPONEN PENCAPAIAN TERENDAH YAITU DARI PENDAPATAN PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH SEBESAR 4,71% DAN PENDAPATAN JASA GIRO SEBESAR 50,43%. MOHON PENJELASAN HAL TERSEBUT.

KEDUA, REALISASI RETRIBUSI DAERAH HANYA MENCAPAI 67,76%. BAHKAN KOMPONEN RETRIBUSI JASA USAHA HANYA TEREALISASI 13,83%, DAN KOMPONEN RETRIBUSI PERIZINAN HANYA TERREALISASI 24,26%, SERTA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH HANYA SEKITAR 9,89% DARI TARGET. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PUN TEREALISASI HANYA 22,76%. MINIMNYA CAPAIAN RETRIBUSI DAERAH MENUNJUKKAN LEMAHNYA TATA KELOLA PENDAPATAN. ANGKA-ANGKA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERSOALAN TEKNIS BIASA, MELAINKAN MENCERMINKAN LEMAHNYA PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN MANAJEMEN ASET DAERAH. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PERANGKAT DAERAH YANG GAGAL MENCAPAI TARGET. SUDAH SAATNYA DIBERLAKUKAN UKURAN KINERJA YANG OBJEKTIF. OPD YANG BERHASIL HARUS DIBERIKAN PENGHARGAAN, SEDANGKAN YANG TERUS-MENERUS GAGAL HARUS DIEVALUASI SECARA SERIUS.

KETIGA, BELANJA BARANG DAN JASA HANYA TERSERAP SEKITAR 82,73 %. INI BERARTI MASIH BANYAK PROGRAM YANG TIDAK TERLAKSANA SECARA OPTIMAL. SETIAP RUPIAH APBD YANG TIDAK MAMPU DIBELANJAKAN TEPAT WAKTU SESUNGGUHNYA ADALAH KESEMPATAN YANG HILANG BAGI MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN YANG LEBIH BAIK. RENDAHNYA PENYERAPAN BELANJA MENUNJUKKAN PERENCANAAN YANG BELUM MATANG. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT BERPANDANGAN BAHWA PERSOALAN INI TIDAK CUKUP DIJAWAB DENGAN ALASAN EFISIENSI ATAUPUN KENDALA ADMINISTRASI. YANG DIBUTUHKAN ADALAH PEMBENAHAN TATA KELOLA PERENCANAAN SEJAK AWAL TAHUN

ANGGARAN AGAR PELAKSANAAN PROGRAM TIDAK MENUMPUK PADA AKHIR TAHUN.

KEEMPAT, PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PINJAMAN SEBESAR RP99 MILIAR, SEMENTARA PADA SAAT YANG SAMA MASIH TERDAPAT SILPA (SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN) LEBIH DARI RP 37 MILIAR LEBIH, KONDISI INI MENIMBULKAN PERTANYAAN PUBLIK MENGENAI ARAH KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH. APAKAH PINJAMAN TERSEBUT BENAR-BENAR MENJADI PILIHAN TERAKHIR? APAKAH TELAH DILAKUKAN ANALISIS MANFAAT DAN RISIKO SECARA MENDALAM? BAGAIMANA STRATEGI PEMERINTAH AGAR KEWAJIBAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN TIDAK MEMBEBANI APBD PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG? KARENA KEBIJAKAN PINJAMAN DAERAH HARUS DIJELASKAN SECARA TERBUKA KEPADA MASYARAKAT.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT BERPANDANGAN BAHWA UTANG DAERAH HANYA DAPAT DIBENARKAN APABILA BENAR-BENAR MENGHASILKAN MANFAAT EKONOMI YANG NYATA BAGI MASYARAKAT DAN MAMPU MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH DI MASA DEPAN.

KELIMA, MASIH BESARNYA PIUTANG PAJAK MAUPUN PIUTANG RETRIBUSI MENJADI INDIKATOR BAHWA POTENSI PENERIMAAN DAERAH BELUM TERGARAP SECARA MAKSIMAL. PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMILIKI KEBERANIAN MELAKUKAN PENATAAN SISTEM PENAGIHAN, DIGITALISASI PELAYANAN, SERTA PENEGAKAN ATURAN TERHADAP WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI YANG TIDAK PATUH. KARENA BESARNYA PIUTANG DAERAH MENUNJUKKAN LEMAHNYA EFEKTIVITAS PENAGIHAN.

KEENAM, FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT MENINGATKAN BAHWA KEBERHASILAN APBD BUKAN SEKADAR DIUKUR DARI ANGKA REALISASI PENDAPATAN MAUPUN BELANJA. YANG JAUH LEBIH PENTING ADALAH SEJAUH MANA APBD MAMPU MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN

BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN. KARENA APBD HARUS BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT.

HARI INI MASYARAKAT MASIH MENGELUHKAN KONDISI INFRASTRUKTUR JALAN, PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MERATA, KESEMPATAN KERJA YANG TERBATAS, SERTA DAYA BELI MASYARAKAT YANG SEMAKIN MENURUN. PERSOALAN-PERSOALAN TERSEBUT HARUS MENJADI FOKUS UTAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM SETIAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD.

KETUJUH, TERKAIT DENGAN BANYAKNYA KEGIATAN ASPIRASI YANG BELUM TEREALISASI ATAU TERTUNDA PADA TAHUN ANGGARAN 2025 HARUS MENJADI PRIORITAS PADA TAHUN INI, DAN HARUS MENJADI PERHATIAN UNTUK PENYELESAIANNYA KARENA KEGIATAN-KEGIATAN INI TIDAK DAJUKAN SECARA TIBA-TIBA MELAINKAN ASPIRASI DARI MASYARAKAT YANG KAMI SERAP DAN MENJADI KONSENSUS ANTARA LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN KONSTITUEN SEHINGGA INI SANGAT DIHARAPKAN REALISASINYA AGAR ASPIRASI DARI KONSTITUEN BISA TERPENUHI DENGAN SEGERA .

BERKENAAN DENGAN NERACA DAERAH, KAMI MEMERLUKAN PENJELASAN LEBIH RINCI MENGENAI BEBERAPA HAL MENYANGKUT ASSET DAN KEWAJIBAN, ANTARA LAIN :

- JENIS PENYISIHAN PIUTANG SEBESAR MINUS 25 MILYAR LEBIH. MOHON PENJELASAN PENYISIHAN MINUS TERSEBUT.
- ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025 SEBESAR RP 2,8 TRILIUN LEBIH, MOHON DIJELASKAN MENGENAI ASET TETAP LAINNYA SEBESAR 82 MILYAR LEBIH SECARA TERPERINCI.
- ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025 SEBESAR RP 30 MILYAR LEBIH, MOHON DIJELASKAN MENGENAI DANA TRANSFER TRASURE DEPOSIT FACILITY (TDF) SECARA TERPERINCI.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI,

KAMI HANYA MENINGATKAN KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA SELURUH JAJARAN AGAR LEBIH MEMPERHATIKAN SERTA DAPAT MENINDAKLANJUTI SELURUH TEMUAN DAN REKOMENDASI YANG ADA PADA LHP BPK. LHP BPK SEYOGIANYA BISA MENJADI BAHAN PERHATIAN BAGI SEMUA PIHAK, KHUSUSNYA SAUDARA BUPATI BESERTA SELURUH JAJARAN, BAHWA MASIH BANYAK HAL YANG PERLU KITA BENAHI, AGAR MENJADI LEBIH BAIK LAGI DAN TIDAK SAMPAI TERULANG KESALAHAN YANG SAMA DI KEMUDIAN HARI. SELAIN ITU, LHP BPK BESERTA SELURUH TEMUAN DAN REKOMENDASINYA SEMAKIN MENEGASKAN PULA, BETAPA PENTINGNYA PENGUATAN PERAN LEGISLATIF, BAIK DARI SISI KAPASITAS, PERAN DAN FUNGSI, MAUPUN PENGUATAN DARI SISI REGULASI, SERTA DUKUNGAN PUBLIK DIMULAI DARI PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, HINGGA PENGAWASAN ANGGARAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM KAMI. PADA GILIRANNYA NANTI FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT AKAN TURUT BERBESAR HATI DALAM MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025, UNTUK DISAHKAN DAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DENGAN CATATAN AGAR MEMPERHATIKAN SARAN DAN USULAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN DIATAS.

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

KUNINGAN, 3 JULI 2026

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT



ALI AKBAR
KETUA



RENI PARLINA, S.E., Sy
SEKRETARIS